



**WALI NAGARI KOTO RAWANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP
NAGARI) TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa setiap Nagari diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) perlu dituangkan dalam Peraturan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK 07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan 27 Nomor 2015 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Rawang Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2018 Nomor 2)
17. Peraturan Nagari Koto Rawang 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Rawang (Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2019 Nomor 8)
18. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO RAWANG

dan

WALI NAGARI KOTO RAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Rawang Tahun 2020 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Nagari untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2020. RKPNag ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Rawang tahun 2020 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Perdes RKP Nagari

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Nagari
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Nagari

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Nagari
- c. Musyawarah Nagari

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Nagari;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP NAGARI

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Nagari
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Nagari

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Nagari melalui Musyawarah Nagari
2. SK Tim Penyusun RKP Nagari
3. Pagu Indikatif Nagari
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Nagari
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)
6. Gambar Rencana Prasarana
7. Rencana Anggaran Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

9. Daftar Usulan RKP Nagari
10. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari
11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari melalui Musrenbang Nagari

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Rawang sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

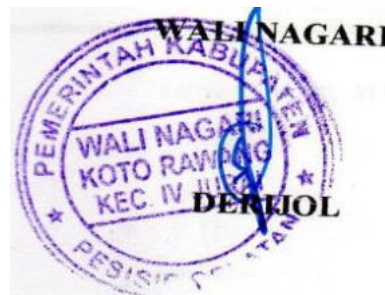
Apabila dipandang perlu Wali Nagari dapat menetapkan Keputusan Wali Nagari, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Koto Rawang oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Koto Rawang

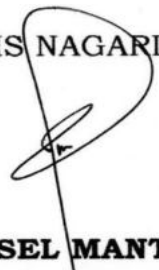
Pada tanggal : 30 April 2020



Diundangkan di : Koto Rawang

Pada Tanggal : 30 April 2020

SEKRETARIS NAGARI KOTO RAWANG,


DISEL MANTO

LEMBARAN NAGARI KOTO RAWANG TAHUN 2020 NOMOR 5